

Kumawula, Vol. 5, No.3, Desember 2022, Hal 426 – 436

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i3.37710>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia *online* di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

## PELATIHAN MEMBANGUN LINGKUNGAN KOMUNITAS HARMONI

Soni Akhmad Nulhaqim<sup>1\*</sup>, Muhammad Fedryansyah<sup>2</sup>, Eva Nuriyah Hidayat<sup>3</sup>,  
Wandi Adiansah<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran.

<sup>3,4</sup>Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat FISIP Universitas Padjadjaran.

\*Korespondensi: [soni.nulhaqim@unpad.ac.id](mailto:soni.nulhaqim@unpad.ac.id)

### ABSTRACT

*Social life will never be separated from conflicts. The existence of conflicts needs to be managed properly so that conflict can be minimized and a harmonious environment in the community can be created properly. Efforts to manage conflict and create a harmonious environment need to be encouraged by the role of local community leaders. But unfortunately, not all community leaders have the understanding, knowledge, and skills to carry out these efforts. Through PPM activities in the form of Training to Build a Harmonious Community Environment, the PPM team strives to provide understanding, knowledge, and skills in making efforts to manage conflict and create a harmonious environment. This PPM activity is integrated with the virtual Community Service Program at Padjadjaran University for the period of August 2021. The target group of this PPM activity is the community leaders in the domiciles of KKN students spread across West Java Province, Banten Province, Lampung Province, and West Sumatra Province. This PPM activity is carried out through the preparation stage, the assessment stage, the plan of treatment stage, the treatment stage, and the monitoring, evaluation, termination, and reporting stages. The results of these PPM activities showed an increase in the understanding, knowledge, and skills of the target group in managing conflict and creating a harmonious environment.*

**Keywords:** *community, harmonious environment, training.*

### ABSTRAK

Kehidupan bermasyarakat tidak akan pernah terlepas dari konflik. Adanya konflik ini perlu dikelola dengan baik agar konflik dapat diminimalisasi dan lingkungan harmoni pada masyarakat dapat tercipta dengan baik. Upaya pengelolaan konflik dan menciptakan lingkungan harmoni perlu didorong oleh peran tokoh masyarakat setempat. Namun sayangnya, tidak semua tokoh masyarakat memiliki pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan upaya tersebut. Melalui kegiatan PPM berupa Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni ini tim PPM berusaha untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam melakukan upaya pengelolaan konflik dan menciptakan lingkungan harmoni. Kegiatan PPM ini terintegrasi dengan KKN virtual Universitas Padjadjaran periode Agustus 2021. Kelompok sasaran dari kegiatan PPM ini yaitu

### RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 01/08/2022

Diterima : 20/11/2022

Dipublikasikan : 20/12/2022

tokoh masyarakat di domisili mahasiswa KKN yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Lampung, dan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan PPM ini dilakukan melalui tahap persiapan, tahap asesmen, tahap *plan of treatment*, tahap *treatment* dan tahap *monitoring*, evaluasi, terminasi dan *reporting*. Hasil dari kegiatan PPM yaitu meningkatnya pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kelompok sasaran dalam melakukan upaya pengelolaan konflik dan menciptakan lingkungan harmoni.

**Kata Kunci:** komunitas, lingkungan harmoni, pelatihan.

## PENDAHULUAN

Konflik merupakan salah satu fenomena sosial yang pasti terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Fuad & Maskanah (2000) konflik yang terjadi pada masyarakat dapat terjadi secara tertutup (*latent*), mencuat (*emerging*), atau terbuka (*manifest*). Setiap konflik yang terjadi juga memiliki derajat dan polanya masing-masing (Ismail, 2012; Yusaputra, 2014).

Konflik pada dasarnya merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan dan menyebabkan ketidakharmonian di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Fisher, et al., 2001; Zakie, 2016; Deutsch, Coleman, & Marcus, 2016; Usman, 2003 dalam Kurniati & Fakhriah, 2017). Konflik berlaku dalam semua aspek relasi sosial, yang bentuknya seperti dalam relasi antar individu, relasi individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dan kelompok (Garna, 1996:65 dalam Diharjo, 2019). Upaya penanganan konflik kemudian dikenal dengan istilah resolusi konflik (Adiansah, Nulhaqim, & Basyar, 2020).

Konflik yang terjadi pada masyarakat perlu dikelola dengan baik agar kerugian-kerugian akibat konflik dapat diminimalisasi. Selain itu, pengelolaan konflik yang baik juga dapat melahirkan kondisi lingkungan masyarakat yang harmoni serta kejadian konflik di masa yang akan datang dapat diminimalisasi. Upaya pengelolaan konflik dan menciptakan lingkungan yang harmoni ini perlu dilakukan oleh berbagai pihak yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, peran dari para tokoh masyarakat setempat menjadi salah satu aspek penting

dalam upaya tersebut. Hal ini karena tokoh masyarakat merupakan penggerak bagi anggota masyarakat yang lain.

Peran penting dari tokoh masyarakat dalam upaya pengelolaan konflik dan menciptakan lingkungan yang harmoni ini perlu dibekali dengan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan khusus dalam melakukan upaya tersebut. Namun, sayangnya tidak semua tokoh masyarakat memiliki pemahaman, pengetahuan dan keterampilan dalam upaya pengelolaan konflik dan menciptakan lingkungan yang harmoni tersebut. Atas dasar inilah, Tim PPM (Pengabdian Pada Masyarakat) berinisiatif untuk mengadakan kegiatan PPM berupa “Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni” dengan memberikan pemahaman, pengetahuan dan keterampilan kepada tokoh masyarakat dalam melakukan upaya pengelolaan konflik dan menciptakan lingkungan harmoni.

Kegiatan PPM ini diintegrasikan dengan kegiatan KKN Virtual Universitas Padjadjaran periode bulan Agustus tahun 2021. Tahapan kegiatan PPM dilakukan melalui tahapan intervensi pekerjaan sosial, hal ini dilakukan karena Tim PPM berasal dari Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran yang dalam melakukan intervensi terhadap individu, keluarga, kelompok atau masyarakat terbiasa menggunakan tahapan intervensi pekerjaan sosial. Tahapan intervensi yang dilakukan dalam kegiatan PPM ini yaitu mulai dari tahap persiapan, tahap asesmen, tahap *plan of treatment*, tahap *treatment* dan tahap *monitoring*, evaluasi, terminasi dan *reporting*. Berdasarkan latar belakang tersebut maka urgensi dalam tulisan ini yaitu akan

mendeskrripsikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan PPM “Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni” ini yang dilakukan melalui tahapan intervensi pekerjaan sosial.

## METODE

Kegiatan PPM ini dilakukan melalui kolaborasi antara Tim PPM dengan mahasiswa KKN Virtual Universitas Padjadjaran periode bulan Agustus tahun 2021. Metode pelaksanaan dalam kegiatan PPM ini yaitu dilakukan dalam bentuk pelatihan secara *online*. Secara sederhana, pelatihan diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (Istanto, Apsari, & Gutama, 2021). Goldtsein dan Gressner (1988) dalam Nulhaqim, et al. (2021) mendefinisikan pelatihan sebagai usaha sistematis untuk menguasai keterampilan, peraturan, konsep, ataupun cara berperilaku yang berdampak pada peningkatan kinerja. Selanjutnya, menurut Robert dan Dearden (1990) dalam Nulhaqim, et al. (2021) menyatakan bahwa pelatihan pada dasarnya meliputi proses belajar mengajar dan latihan bertujuan untuk mencapai tingkatan kompetensi tertentu atau efisiensi kerja.

Kelompok sasaran dalam pelatihan ini yaitu para tokoh masyarakat yang berada di domisili mahasiswa KKN. Masing-masing mahasiswa KKN bermitra dengan dua orang tokoh masyarakat di wilayah domisilinya. Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi mitra mahasiswa KKN tersebut mulai dari ketua RT, ketua RW, kader PKK, kepala desa, sekretaris desa, tokoh pemuda hingga tokoh agama.

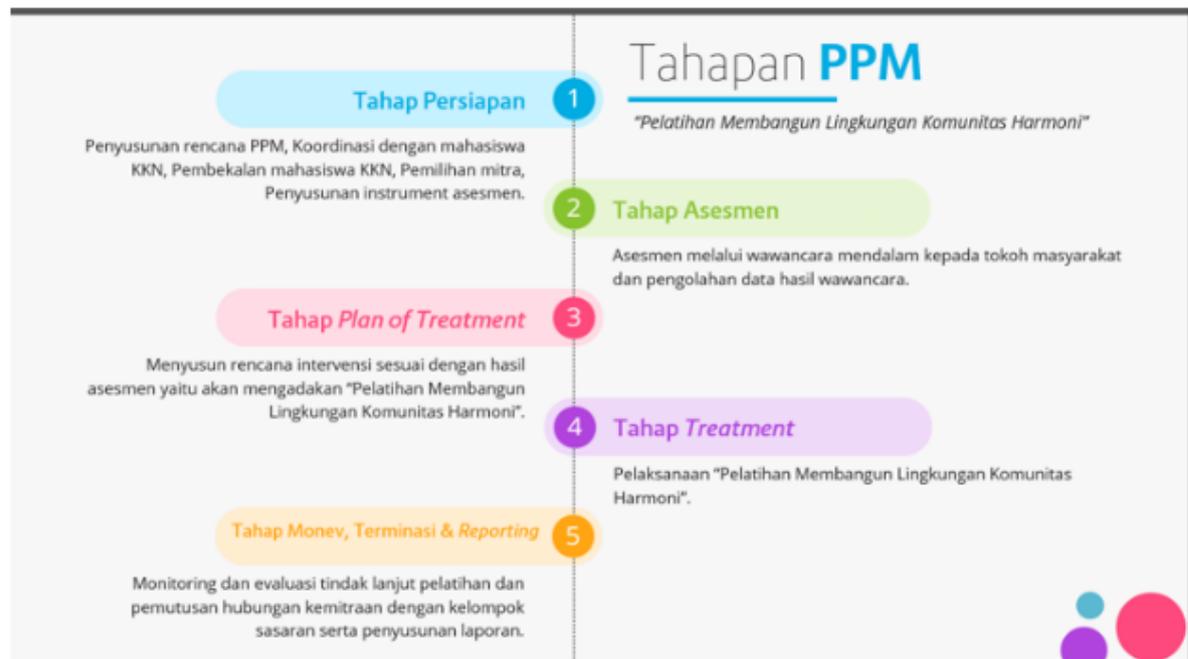
Wilayah domisili mahasiswa KKN meliputi wilayah berikut:

1. Kelurahan Jayakarsa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
2. Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
3. Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.
4. Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
5. Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
6. Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
7. Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
8. Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
9. Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
10. Jorong Parik Sungayang, Nagari Tanjuang Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan PPM Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni ini dilaksanakan melalui beberapa tahap pelaksanaan mulai tahap persiapan, tahap asesmen, tahap *plan of treatment*, tahap *treatment* dan tahap *monitoring*, evaluasi, terminasi dan *reporting*. Tahapan yang dilakukan ini dikenal dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial. Setiap tahapan kegiatan dilakukan melalui kolaborasi antara Tim PPM dengan mahasiswa KKN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PPM “Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni” ini dilakukan melalui lima tahapan utama yaitu tahap persiapan, tahap asesmen, tahap *plan of treatment*, tahap *treatment* dan tahap *monitoring*, evaluasi, terminasi dan *reporting*. Gambar 1 berikut ini merupakan ringkasan kelima tahapan kegiatan yang dilakukan dalam PPM ini.



**Gambar 1. Ringkasan Tahapan Kegiatan PPM "Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni"**

(Sumber: PPM/KKN "Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni", 2021)

### Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan tim PPM dan mahasiswa KKN melakukan beberapa kegiatan mulai dari penyusunan rencana PPM, koordinasi antara Tim PPM dengan mahasiswa KKN, pembekalan mahasiswa KKN, pemilihan mitra di domisili masing-masing mahasiswa KKN dan penyusunan instrumen asesmen.

Penyusunan rencana PPM dilakukan secara langsung oleh tim PPM. Rencana PPM ini terdiri dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) PPM yang akan menjadi pedoman bagi tim PPM dan mahasiswa KKN dalam melaksanakan berbagai kegiatan pada PPM ini. Melalui KAK yang telah disusun, seluruh pihak yang terlibat dalam PPM ini mengetahui latar belakang dilaksanakannya PPM, tujuan dan manfaat PPM serta metode pelaksanaan PPM yang akan dilakukan. Selain itu, rencana PPM ini juga dilengkapi dengan *timeline* kegiatan PPM yang menjadi acuan bagi tim PPM dan mahasiswa KKN dalam mengatur kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam PPM ini setiap minggunya.

Dalam tahap persiapan, tim PPM juga melakukan koordinasi dengan mahasiswa KKN. Koordinasi dilakukan melalui Whatsapp

*group* dan pertemuan rutin secara daring (dalam jaringan) melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Koordinasi dalam tahap persiapan ini dilakukan untuk memantapkan persiapan pelaksanaan PPM mulai dari perkenalan antara tim PPM dan mahasiswa KKN, menyamakan persepsi mengenai gambaran umum kegiatan PPM yang akan dilakukan, pembagian tugas antara tim PPM dan mahasiswa KKN, pemilihan mitra serta penyusunan instrumen asesmen.

Pada tahap persiapan, tim PPM memberikan pembekalan kepada mahasiswa KKN dengan tujuan agar mahasiswa KKN memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama mengenai isu yang diangkat dalam PPM yaitu mengenai isu konflik dan lingkungan yang harmoni. Kegiatan pembekalan ini dilakukan melalui empat sesi berbeda yang diberikan oleh empat narasumber yang berasal dari akademisi yang memiliki kompetensi khusus pada isu konflik dan lingkungan yang harmoni. Keempat narasumber akademisi ini merupakan dosen dari Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Berikut ini merupakan judul dan

narasumber keempat sesi pembekalan dalam kegiatan PPM ini.

1. Resolusi Konflik Sosial dan Harmoni oleh Dr. Soni Akhmad Nulhaqim, S.Sos., M.Si.
2. Konflik Sosial dan Hak Asasi Manusia oleh Dr. Eva Nuriyah Hidayat, S.Sos, M.Si.
3. Alat Bantu Analisis Konflik Sosial (Penahapan Konflik Sosial) oleh Dr. Hery Wibowo., S.Psi., MM.
4. Alat Bantu Analisis Konflik Sosial (Urutan Kejadian Konflik Sosial) oleh Maulana Irfan, S.Sos., M.I.Kom.

Selanjutnya, dalam tahap persiapan, mahasiswa KKN diarahkan untuk melakukan pemilihan mitra KKN. Masing-masing mahasiswa KKN diharuskan untuk menentukan dua orang mitra KKN yang berasal dari tokoh masyarakat yang ada di wilayah domisili masing-masing. Tokoh-tokoh masyarakat yang dipilih oleh mahasiswa KKN sebagai mitra KKN sebagian besar merupakan ketua RT, ketua RW, kader PKK, kepala desa, sekretaris desa, tokoh pemuda dan tokoh agama. Para tokoh masyarakat yang telah dipilih oleh mahasiswa KKN sebagai mitra ini selanjutnya dijadikan sebagai kelompok sasaran kegiatan PPM. Pada tahap ini, para tokoh masyarakat yang dipilih oleh mahasiswa KKN sebagai mitra KKN diberikan *inform concern* sebagai persetujuan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk menjadi mitra KKN sekaligus menjadi kelompok sasaran dalam kegiatan PPM ini.

Tokoh masyarakat sering dianggap sebagai pemimpin lokal yang dapat memengaruhi anggota masyarakat lainnya (Darwis, Resnawaty & Nuriyah, 2020). Hal inilah yang mendasari dijadikannya tokoh masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam kegiatan PPM ini. Para tokoh masyarakat ini diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari kegiatan PPM ini kepada anggota masyarakat yang lain dan dapat mendorong anggota masyarakat di lingkungannya untuk dapat menciptakan lingkungan yang harmoni sesuai dengan tema kegiatan PPM.

Pada tahap persiapan, tim PPM dan mahasiswa KKN juga menyusun instrumen asesmen berupa pedoman wawancara yang akan digunakan sebagai acuan pada saat melakukan wawancara kepada para tokoh masyarakat yang telah bersedia menjadi mitra KKN mengenai konflik dan lingkungan harmoni di lingkungan domisili masing-masing. Penyusunan instrumen asesmen ini dilakukan melalui diskusi secara daring yang diikuti oleh seluruh Tim PPM dan mahasiswa KKN.

### Tahap Asesmen

Tahap kedua dalam PPM ini yaitu tahap asesmen. Tahap asesmen yaitu tahap di mana mahasiswa KKN melakukan penggalan data mengenai isu konflik dan lingkungan harmoni di lingkungan domisilinya masing-masing. Asesmen ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada para tokoh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Wawancara mendalam ini dilakukan baik secara daring maupun secara luring dengan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing serta menyesuaikan dengan kesediaan para kelompok sasaran.

Penyesuaian dengan kondisi lingkungan yaitu dimaksudkan untuk meminimalisasi penyebaran COVID-19 ketika wawancara dilakukan. Untuk lingkungan yang dianggap aman wawancara dilakukan secara luring dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sementara itu, untuk lingkungan yang dianggap rentan maka wawancara dilakukan secara daring melalui *video call* Whatsapp atau Zoom Meeting. Selanjutnya, penyesuaian dengan kesediaan kelompok sasaran yaitu dimaksudkan agar kegiatan wawancara tidak mengganggu aktivitas para kelompok sasaran.

Setelah seluruh kelompok sasaran berhasil diwawancarai, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data terhadap hasil wawancara tersebut. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis kasus konflik yang terjadi di lingkungan domisili mahasiswa

KKN. Tabel 1 berikut ini merupakan data terkait jenis kasus konflik yang pernah terjadi di lingkungan domisili mahasiswa KKN.

Tabel 1. Jenis Kasus Konflik yang Pernah Terjadi di Lingkungan Domisili Mahasiswa KKN

| No.   | Domisili Mahasiswa KKN   | Jenis Kasus Konflik yang Pernah Terjadi  |
|-------|--|--|
| 1.    | Kelurahan Jayakarsa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.  | Konflik akibat pembuatan selokan air tanpa izin.   |
| 2.    | Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.   | Konflik penolakan pembangunan peternakan ayam di tengah pemukiman.   |
| 3.5.  | Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.  | Perselisihan akibat iuran bulanan.   |
| 4.6.  | Desa Sukaurip, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.   | Konflik akibat pembagian bantuan sosial yang tidak tepat jumlah dan tidak tepat sasaran.   |
| 5.7   | Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Konflik akibat perlombaan antar wilayah.</li> <li>● Konflik akibat parkir sembarangan.</li> <li>● Konflik akibat pembuangan sampah.</li> <li>● Konflik akibat renovasi rumah yang mengganggu kenyamanan warga lain (adanya polusi udara dan polusi suara).</li> </ul> |
| 6.8.  | Desa Cilangkap, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Konflik akibat perbedaan pandangan politik.</li> <li>● Perselisihan akibat renovasi rumah tanpa izin warga setempat.</li> </ul>   |
| 7.9.  | Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.                           | Perbedaan pendapat dalam tata cara beribadah   |
| 8.10. | Jorong Parik Sungayang, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat | Sengketa batas tanah.  |
| 9.    | Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.   | Tidak teridentifikasi adanya konflik.  |
| 10.   | Kelurahan Rancaekek Kencana, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.                                | Tidak teridentifikasi adanya konflik.  |

(Sumber: Laporan PPM/KKN “Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni”, 2021)

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa jenis kasus konflik yang terjadi di domisili mahasiswa KKN cukup beragam mulai dari kasus konflik pada bidang sosial, lingkungan, ekonomi, politik, hingga agama. Secara umum konflik-konflik tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan negosiasi dan mediasi yang difasilitasi oleh tokoh masyarakat setempat. Meskipun dalam hal ini pada beberapa kasus konflik peran tokoh masyarakat tersebut belum optimal.

Sementara itu, berdasarkan data pada Tabel 1 juga dapat dilihat bahwa terdapat dua daerah domisili mahasiswa KKN tidak teridentifikasi adanya konflik. Dalam hal ini lingkungan tersebut dianggap telah harmoni. Lingkungan yang harmoni ini pada dasarnya merupakan salah satu bentuk keberhasilan para tokoh masyarakat untuk mendorong warganya dalam menjaga kondusivitas di lingkungan tempat tinggal mereka.

Secara umum, setiap tokoh masyarakat di domisili mahasiswa KKN juga telah melakukan

berbagai upaya untuk menjaga agar lingkungan tetap harmoni, para tokoh masyarakat di domisili mahasiswa KKN secara umum selalu mendorong agar masyarakat di lingkungannya selalu bergotong-royong (misalnya dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui kerja bakti, pada saat upacara pernikahan, pemulasaraan jenazah, siskamling, dll), saling tolong menolong, saling toleransi antar umat beragama, menjunjung tinggi semboyan Bhineka Tunggal Ika dan melakukan interaksi positif antar sesama anggota masyarakat misalnya melalui berbagai kegiatan keagamaan, arisan warga, peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan secara bersama-sama, dll.

Dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang harmoni ini, para tokoh masyarakat menyatakan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan seperti kepala desa, babinsa, bhabinkamtibmas dan masyarakat cara langsung juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang harmoni.

#### **Tahap Plan of Treatment**

Berdasarkan hasil asesmen, tim PPM menyimpulkan bahwa upaya penanganan konflik dan upaya membangun lingkungan komunitas harmoni yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat di lingkungan domisili mahasiswa KKN belum dilakukan secara optimal. Hal ini menunjukkan terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan para tokoh masyarakat di lingkungan domisili mahasiswa KKN dalam hal penanganan konflik dan membangun lingkungan komunitas yang harmoni.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, maka rencana intervensi (*plan of treatment*) yang disusun oleh tim PPM yaitu berupa "Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni". Pelatihan ini akan dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting. Kelompok sasaran dalam pelatihan ini yaitu tokoh masyarakat yang telah menjadi mitra KKN di domisili masing-masing mahasiswa KKN. Sementara itu, narasumber dalam pelatihan ini

akan berasal dari akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi khusus dalam isu konflik dan lingkungan harmoni.

#### **Tahap Treatment**

Tahap *treatment* merupakan tahap pelaksanaan kegiatan PPM dan sekaligus tahap pelaksanaan dari rencana intervensi yang telah disusun sebelumnya. Dalam tahap *treatment* ini dilakukan Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni dengan menghadirkan empat orang narasumber yang berasal dari akademisi dan praktisi yang memiliki kompetensi khusus dalam isu konflik dan lingkungan harmoni. Pelatihan dilaksanakan pada hari Senin, 2 Agustus 2021 pada pukul 13.30-16.30 WIB secara daring melalui Zoom Meeting. Pelatihan dihadiri oleh 20 orang peserta yang berasal dari tokoh masyarakat di domisili mahasiswa KKN. Kegiatan Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni ini diawali dengan pembukaan oleh Ketua Tim PPM yaitu Dr. Soni Akhmad Nulhaqim, S.Sos., M.Si yang menyampaikan tentang pentingnya memahami konflik dan strategi untuk menciptakan lingkungan yang harmoni bagi tokoh masyarakat. Acara dilanjutkan dengan sesi pemaparan dari keempat narasumber yang dipimpin oleh moderator Dr. Hery Wibowo, S.Psi., MM.

Narasumber pertama yaitu Dr. Muhammad Fedryansyah, S.Sos., M.Si (Dosen Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran) yang memberikan materi mengenai "Kebijakan Penanganan Konflik di Indonesia". Dalam pemaparannya, narasumber pertama menjelaskan bahwa konflik akan selalu ada dalam kehidupan masyarakat karena konflik merupakan bagian dari interaksi antar manusia. Konflik terjadi karena beberapa faktor mulai dari adanya perbedaan, adanya sumber daya yang terbatas, adanya kekerasan kultural hingga adanya kekerasan kultural. Pada dasarnya konflik bersifat laten dan tidak termanifestasi secara langsung. Indonesia sangat rentan dengan potensi konflik karena memiliki banyak perbedaan di antara penduduknya. Namun

potensi konflik tersebut harus dikelola dengan baik demi mewujudkan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Narasumber kedua yaitu Dr. Rudi Saprudin Darwis, S.Sos., M.Si (Dosen Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran). Judul materi narasumber kedua ini yaitu “Keserasian Sosial Pada Masyarakat di Daerah Industri”. Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa dunia industri membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai sehingga industri menuntut pekerja yang memiliki kualifikasi tertentu. Beberapa industri menggunakan tenaga kerja dari luar daerah karena seringkali tenaga kerja lokal tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Sementara itu, tenaga kerja lokal selalu merasa berhak untuk diprioritaskan. Hal ini seringkali menjadi potensi konflik pada daerah industri. Di sisi lain juga terdapat beberapa potensi konflik di daerah industri, misalnya:

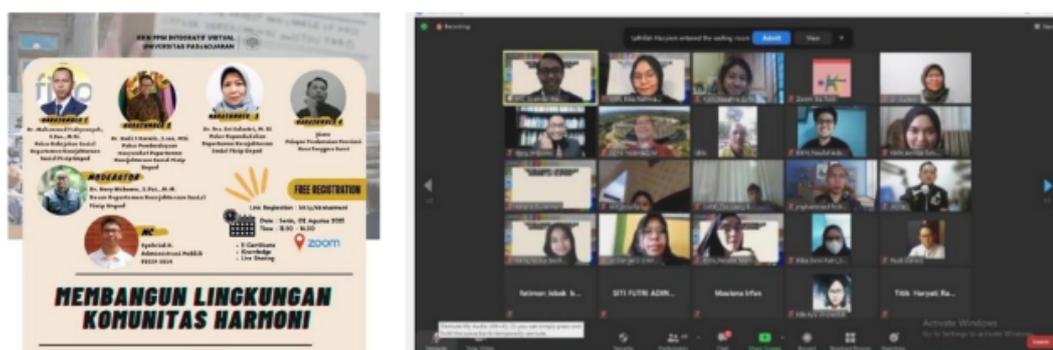
1. Sikap tegang dan bermusuhan antar etnis dalam mengejar kesempatan kerja pada masyarakat di daerah industri.
2. Sumber masalah dalam keserasian sosial di antaranya tidak seimbang dalam penguasaan sumber daya menyebabkan tidak tercapai pemerataan sosial ekonomi.
3. Perebutan sumber daya ekonomi dapat menjadi sumber terjadinya ketidakserasian sosial.

Adanya potensi konflik tersebut, harus diantisipasi oleh dunia industri dengan melakukan berbagai upaya untuk menciptakan keserasian sosial dengan masyarakat lokal di mana mereka beroperasi. Dalam upaya tersebut, terdapat beberapa faktor dasar yang menentukan keserasian sosial yang terdiri dari demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Sikap dan perilaku kedua belah pihak antara dunia industri dengan masyarakat turut menentukan keserasian sosial, perilaku yang menunjukkan kepedulian terhadap kepentingan orang lain ataupun kepentingan bersama akan dinilai baik. Peluang untuk menunjukkan

perilaku baik masih tersedia pada masyarakat sub-urban, seperti gotong royong dan tolong menolong.

Materi ketiga yaitu materi mengenai “Kependudukan dan Lingkungan Harmoni” yang disampaikan oleh Dr. Dra. Sri Sulastri, M.Si (Dosen Departemen Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran). Pada materi ketiga ini dijelaskan bahwa potensi konflik dapat terjadi akibat adanya keragaman karakteristik penduduk di suatu wilayah, seperti: jenis kelamin, etnis, suku, agama, tingkat pendidikan, status ekonomi, status perkawinan, dsb. Adanya keragaman tersebut menyebabkan kebutuhan penduduk juga beragam namun seringkali sumber daya yang dimiliki terbatas. Dalam hal ini, terjadinya perebutan sumber daya pada akhirnya menyebabkan konflik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dan penyediaan sumber daya oleh lembaga-lembaga layanan baik lembaga pemerintah maupun swasta agar kebutuhan penduduk dapat terpenuhi dan konflik dapat diminimalisasi serta lingkungan yang harmoni dapat diciptakan secara berkelanjutan.

Narasumber terakhir yaitu Jiono (Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Nusa Tenggara Barat) yang menyampaikan materi mengenai “Peran Tenaga Pelopor Perdamaian dalam Penanganan Konflik”. Tenaga Pelopor Perdamaian adalah seseorang relawan terlatih di bidang perdamaian sosial dan atau penanganan konflik sosial yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelopor atau perintis penanganan konflik sosial di lingkungan masyarakat. Tenaga Pelopor Perdamaian berada di bawah Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial RI. Peran Tenaga Pelopor Perdamaian meliputi pencegahan konflik, pendukung penghentian konflik dan pemulih konflik sosial sehingga perdamaian di lingkungan masyarakat terus tercipta, terpelihara, dan terjaga secara berkelanjutan.



**Gambar 2. Dokumentasi Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni**  
(Sumber: Laporan PPM/KKN “Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni”, 2021)

### Tahap *Monitoring*, *Evaluasi*, *Terminasi* dan *Reporting*

Setelah mengikuti Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni, kelompok sasaran memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan baru mengenai konflik sosial dan lingkungan komunitas harmoni. Kelompok sasaran juga menjadi memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam mengidentifikasi jenis dan potensi konflik yang sering terjadi di wilayahnya masing-masing dan juga mampu merumuskan upaya pencegahan serta melakukan upaya peringatan dini terhadap jenis konflik tersebut. Selanjutnya, kelompok sasaran juga mampu merumuskan strategi untuk menciptakan lingkungan komunitas harmoni di wilayahnya masing-masing.

Setelah mengikuti pelatihan, semua tokoh masyarakat segera mengadakan pertemuan di wilayah mereka masing-masing untuk membagikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang telah mereka dapatkan pada pelatihan kepada tokoh masyarakat lain dan kepada warga yang ada di wilayah mereka. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas jenis dan potensi konflik yang sering terjadi di wilayah mereka serta merumuskan upaya pencegahannya. Strategi untuk menciptakan lingkungan komunitas harmoni juga berhasil dirumuskan dalam pertemuan tersebut misalnya yaitu dengan kembali mengaktifkan kegiatan siskamling, mengagendakan pertemuan rutin serta memperkuat semangat gotong royong dalam berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, di akhir kegiatan PPM, mahasiswa KKN melakukan terminasi dengan

kelompok sasaran. Terminasi dalam hal ini merupakan pemutusan hubungan intervensi terhadap kelompok sasaran karena tujuan intervensi telah tercapai. Pada kegiatan PPM ini terminasi dilakukan dengan pemutusan kontrak kemitraan dengan para tokoh masyarakat.

Setelah seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan PPM dilaksanakan, selanjutnya tim PPM dan Mahasiswa KKN melakukan penulisan laporan (*reporting*) pelaksanaan kegiatan PPM.

### SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa kesimpulan mengenai Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1. PPM “Pelatihan Membangun Lingkungan Harmoni” ini dilakukan melalui tahap persiapan, tahap asesmen, tahap *plan of treatment*, tahap *treatment* dan tahap *monitoring*, evaluasi dan terminasi.
2. Pada tahap persiapan tim PPM dan mahasiswa KKN melakukan beberapa kegiatan mulai dari penyusunan rencana PPM, koordinasi antara tim PPM dengan mahasiswa KKN, pembekalan mahasiswa KKN, pemilihan mitra di domisili masing-masing mahasiswa KKN dan penyusunan instrumen asesmen. Tahap asesmen dilakukan melalui wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat dan pengolahan data hasil wawancara. Tahap *plan of treatment* dilakukan dengan menyusun rencana intervensi sesuai dengan hasil asesmen. Tahap *treatment* dilakukan

dengan melaksanakan Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni dan tahap *monitoring*, evaluasi dan terminasi dilakukan dengan melakukan tindak lanjut pasca pelatihan dan pemutusan hubungan kemitraan dengan kelompok sasaran. Kegiatan diakhiri dengan penyusunan laporan (*reporting*).

3. Seluruh tahapan kegiatan PPM dilakukan melalui kolaborasi antara tim dosen pelaksana PPM dengan mahasiswa KKN. Kegiatan PPM dilakukan baik secara daring (dalam jaringan) maupun luring (luar jaringan).
4. Setelah mengikuti Pelatihan Membangun Lingkungan Komunitas Harmoni, kelompok sasaran memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan baru mengenai konflik sosial dan lingkungan komunitas harmoni. Kelompok sasaran juga menjadi memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam mengidentifikasi jenis dan potensi konflik yang sering terjadi di wilayahnya masing-masing dan juga mampu merumuskan upaya pencegahan serta melakukan upaya peringatan dini terhadap jenis konflik tersebut. Selanjutnya, kelompok sasaran juga mampu merumuskan strategi untuk menciptakan lingkungan komunitas harmoni di wilayahnya masing-masing.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka tim PPM memiliki beberapa saran yang dapat diterapkan oleh kelompok sasaran dalam PPM ini. Beberapa saran tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat harus memiliki pemahaman mengenai konflik sosial, berbagai upaya pencegahan konflik dan upaya resolusi konflik. Hal ini karena konflik merupakan salah satu fenomena sosial yang selalu terjadi dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.
2. Tokoh masyarakat harus berperan secara optimal dalam menciptakan lingkungan komunitas yang harmoni.
3. Upaya pencegahan konflik, resolusi konflik dan upaya membangun lingkungan

komunitas yang harmoni harus selalu disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. K. (2020). RESOLUSI KONFLIK BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENGEMBANGAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF RESOLUSI KONFLIK AGRARIA. *Share: Social Work Jurnal*, 10(2), 163–174.
- Darwis, Rudi Saprudin., Resnawaty, Risna., Nuriyah, Eva. (2020). Peningkatan Sensitivitas Kepemimpinan Lokal dalam Pengelolaan Sungat Citarum Melalui Teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) di Desa Rancamanyar. *Jurnal Kumawula*, 3(1), 48-59. doi: 10.24198/kumawula.v3i1.24820
- Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (2016). *Handbook Resolusi Konflik*. Bandung: Nusamedia.
- Diharjo, S. M. (2019). Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis*, 5(1), 1-17. Retrieved from <http://jurnal.stiks-tarakanita.ac.id/index.php/JIK/article/view/259>
- Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Fuad, F., & Maskanah, S. (2000). *Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Bogor: Pustaka Latin.
- Ismail. (2012). Penggabungan Teori Konflik Strukturalist- Non - Marxist dan Teori Fungsionalisme Struktural - Talcott Parsons: (Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif sebagai Resolusi Konflik Politik dan Tindak Kekerasan di Indonesia). *Jurnal Esensia*, 13(1), 67-84. doi:10.14421/esensia.v13i1.722
- Istanto, D., Apsari, N. C., & Gutama, A. S. (2021). PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM KEGIATAN BANK SAMPAH  
(Studi Kasus Pada Kelompok  
Masyarakat Pengelola dan Nasabah Bank  
Sampah Wargi Manglayang RW.06  
Kecamatan Cibiru, Kota Bandung).  
*Share: Social Work Jurnal*, 11(1), 41–50.

Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN  
Sebagai Mediator dalam Penyelesaian  
Sengketa Tanah di Indonesia Pasca  
PERKABAN Nomor 11 Tahun 2016.  
*Jurnal Sosiohumaniora*, 19(2), 95-105.  
doi:10.24198/sosiohumaniora.v19i2.119  
99

Nulhaqim, Soni Akhmad., Wibowo, Hery.,  
Irfan, Maulana., Gutama, Arie Surya.  
(2021). Peningkatan Kapasitas dalam  
Pemasaran Online Bagi Pelaku Usaha  
Kecil yang Terdampak Kondisi Pandemi  
COVID-19. *Jurnal Kumawula*, 4(1),  
165-176. doi:  
10.24198/kumawula.v4i1.32453

Yusaputra, M. I. (2014). Resolusi Konflik  
Masyarakat Kelurahan Baiya dan  
Kelurahan Lambara. *Jurnal Academica*,  
6(2), 1317-1346. Retrieved from  
[http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php  
/academica/article/view/4316/3223](http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/academica/article/view/4316/3223)

Zakie, M. (2016). Konflik Agraria yang Tak  
Pernah Reda. *Jurnal Legality*, 24(1), 40-  
45. doi:10.22219/jihl.v24i1.4256